BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia bisnis di Indonesia mengalami kemunduran setelah terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997.dampak yang ditimbulakan dari krisis tersebut diantaranya adalah terjadinya likuiditasi perbankan dan tidak sedikit perusahaan yang mengalami kebangkrutan.dampak lainnanya terjadi dari krisis tersebut menunjukan banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan,salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai tidak dibangun diatas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengolahan perusahaan yang sehat.dampak krisi ekonomi juga di rasakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu penggerak perekonomian bangsa , dimana BUMN mengalami penurunana kinerjanya.selain penurunana kinerja keuangan yang menurun , penjualan masing-masing produk BUMN pun mengalami penurunan.

Salah satu penyebab terjadinya penurunana kinerjanya disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan tersebut atau tidak dilaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*,tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis resiko atau hasil investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif , yang pada akhirnya menurunkan dan memudarkan kepercayaan kepada pemodal.serta dapat disebabkan lemahnya peratuaran dan

perundangan yang mengatur ,mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemegang saham.Dewan Komisaris,Dewan Direksi , serta pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan lainya sehingga pengawasan terhadah kinerja perusahaan sangat longgar.

Oleh karena itu pada tahuan 2007 di Indonesia, konsep *Good Corporate Governance* mulai banyak diperbincangkan berdasarkan kondisi tersebut diatas, pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan internasional meperkenalkan konsep *Good Corporate Governance*, karena penerapan *Good Corporate Governance* dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan.

Dari sekian banyak perusahaan, hanya perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang dinilai lebih siap melaksanakan *Good Corporate Governance.* Lantas mengapa justru BUMN yang dipandang lebih siap untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* dibandingkan dengan perusahaan swasta, BUMN dinilai berhasil melakukan penertibannya sejak tahun 1995 dan itu menjadikan flexsibel.dimulai Keppres No. 171 tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dijadikan dasar yang kemudian diteruskan dengan Keputusan Mentri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (No.KEP-23/M-PBUMN/2000) tanggal 3 mei 2000 tentang pengembangan praktek *Good Corporate Governance* dalam peusahaan (BUMN) Nomor:KEP-171/M-MBUMN/2002 tentang penerapan praktek-praktek *Good Corporate Governance.*

PT Pos Indonesia berkomitmen untuk menerapkan praktek-praktek GCG dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari.komitmen tersebut diwujudkan antara lain

dengan membuat infra struktur GCG yang melandasi penerapan GCG di linkungan perusahaan .diantaranya adalah dengan penyusunan pedoman *Corporate Governance (code of corforate governance)* PT Pos Indonesia.pedoman ini menjadi acuan bagi organ perusahaan dalam menegakan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung seluruh jajaran perusahaan.

Menerapkan proses *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan bukanlah merupakan suatu proses yang mudah. Diperlukan konsitensi, komitmen, dan pemahaman yang jelas dari seluruh bagian di perusahaan mengenai bagaimana seharusnya proses tersebut dijalankan.

Begitu pun di PT Pos Indonesia (Persero), fenomena yang terjadi di PT Pos Indonesia (Persero) seperti yang dikemukan oleh Accounting Manager PT Pos Indonesia (Persero), Kuslana bahwa permasalahan yang terjadi di PT Pos Indonesia (Persero) adanya perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit dimana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah di audit karena komisaris berpendapat mengenai bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya (BPYDS) dan penyertaan modal negara (PMN) pada taun 2006 yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri dibawah hutang jangka panjang, sedangkan menurut komite audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2009.

Adapun, Fenomena umum yang terjadi beberapa tahun kebelakang adalah Pemerintah yang tidak luput dari program perbaikan tata laksana perusahaan yang baik. Hal tersebut dilakukan karena fenomena yang terjadi pada tahun 2002 lalu, seluruh Perusahaan (BUMN) yang memiliki *asset* senilai Rp 924 triliun, dan ratusan triliun tersebut diperoleh laba setelah pajak sebesar 26,9 triliun, sementara *Return On Assets* (ROA) rata-rata sebesar 2,86 % dan *Return On Equity* (ROE) rata-rata sebesar 10,2 %. Maka dengan kejadian tersebut dapat dikatakan peran auditor intern di rata-rata Perusahaan (BUMN) di Indonesia kurang maksimal sehingga banyak terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada setiap Perusahaan (BUMN) (sumber : www.sinarharapan.co.id) oleh Amas Nasrudin, 2002.

Dari pengamatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang penulis ambil dari internet dengan situs (www.BUMN-ri.com) (Arif Firmansyah, 2003), diketahui PT Pos Indonesia Bandung saat ini mengalami permasalahan dalam hal Pemeriksaan Intern atau audit intern Perusahaan dimana kasus korupsi di PT Pos yang terkait pemberian komisi kepada pelanggan berawal dengan adanya Surat Edaran Direktur Operasional PT Pos No:41/DIROP/0303 tanggal 20 Maret 2003 yang memberi komisi antara tiga sampai lima persen kepada pelanggan. Namun penerapan pemberian komisi diberlakukan secara berbeda oleh Kepala Kanwil Kantor Pos IV Jakarta yaitu lima sampai enam persen. Selain itu dari hasil pengusutan Kejagung didapati bukti kwitansi tanda terima fiktif dari pelanggan yang seolah-olah uang komisi benar-benar diterima pelanggan. Padahal uang itu diterima sejumlah oknum pegawai PT Pos Indonesia, sehubungan dengan permasalahan tersebut Auditor Intern

dalam hal ini Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PT Pos Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya memeriksa atau mengaudit laporan keuangan PT. Pos Indonesia dan dari hasil pemeriksaan tersebut tim auditor intern atau Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pos Indonesia melaporkan dan menyampaikan informasi hasil temuan auditnya kepada pihak manajemen yaitu dewan direksi PT. Pos Indonesia yang berisi rekomendasi-rekomendasi maupun saran-saran perbaikannya untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh pihak manajemen dan bertujuan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak intern PT. Pos Indonesia agar meningkatkan efektivitas operasional perusahaan untuk lebih baik dan terarah. Dan untuk memaksimalkan kerja auditnya seorang auditor internal harus memiliki kriteria-kriteria auditor yang harus dimiliki setiap individu masing-masing seperti independensi, kompetensi, perencanaan audit, evaluasi bahan bukti, dan pelaporan dan tindak lanjut. Semua kriteria tersebut harus dimiliki auditor internal agar auditor menghasilkan temuan-temuan audit dengan baik dan bertujuan untuk memajukan perusahaan. (Sumber: www.sinarharapan.co.id).

Adanya perbedaan pandangan tata kelola perusahaan antara komisaris dengan komite audit berdampak pada tata kelola perusahaan menjadi buruk. Berdasarkan penjelasan di atas maka PT Pos Indonesia (Persero) harus melakukan upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di PT Pos Indonesia (Persero), serta agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan menjalankan perusahaan dengan baik agar tujuan perusahaan dapat terjadi maka PT Pos Indonesia (Persero) dituntut melakukan prinsip-prinsip *Good Coporate governance* yaitu :

(1)Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3). Responsibilitas, (4). Independensi, (5). Kewajaran dan kesetaraan.

Maka PT Pos Indonesia (Persero)harus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Coporate Governance*. Salah satu prasyarat pelaksanaan *Good Coporate Governance* di BUMN dan perusahaan publik adalah keberadaan komite audit, seperti yang terutang dalam pasal (2) ayat (1) keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-103/M-MBU/2002 bahwa Komisaris/Dewan Pengawas harus membentu Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan membantu komisaris/dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam bidang *corporate governance*, komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalanakan ssesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan melakukan pengawasan efektif terhadap benturan atau potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan.

Komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain terikat dengan sistem pengawasaninternal perusahaan (Moch. Wahyudin Zarkasyi, Ak, 2008:17).

Berikut beberapa hal yang lazim nya tercakup dalam tugas-tugas komite audit: (1). Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan peniaian terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan, (2). Memonitor proses peradilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda dalam hal mana perusahaan

menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya. (3). Memerikasa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan, (4). Mengharuskan dan memeriksa laporan auditor internal mengenai hasil pengkajian atas penerapan *Good Governance* (GCG) diperusahaan dan temuan-temuan penting lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komite audit ini bertujuan untuk membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengaendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.

Komite audit memberikan informasi yang diperlukan dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif.komite audit bertindak sebagai pengawasan internal ,penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan .komite audit memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang terkaitan dengan pengolahan perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Akuntan memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*. Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai auditor internal, yang memiliki fungsi sebagai *Compliance Auditor* dan *Internal Business Consultant* bagi perusahaan dituntut antara lain mampu memberikan nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka mewujudkan *Good Coperate Governance* .

Setiap pedoman *good corporate governance* tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada setiap organisasi atau perusahaan hal ini dimaksudkan karena kebutuhan setiap perusahan berbeda-beda dan setiap akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Setiap perusahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip yang ada untuk mengembangkan praktik-praktik *Good Corporate Govern*ance yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.

Profesi audit internal mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, keberadaannya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independen dengan menciptakan sikap professional dalam setiap aktivitasnya mendorong pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian terhadap profesi ini.
Salah satu fungsi audit internal yaitu menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektifitas system pengendalian manajemen dan kualitas kinerja perusahaan bagi manajemen. Beberaa masalah kemudian timbul berkaitan dengan audit internal, sebagai efektif keberadaan audit internal dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Sistem pengendalian intern semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan organisasi yang sehat dda berhasil . kewajiban untuk mengembangkan , menjaga dan melaporkan system pengendalian intern merupakan ketentuan instansi pemerintah dan BUMN/BUMD, Bank, Perusahaan Publik, maupun lembaga yang mendapat bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut dan mengingat pentingnya peran komite audit dan mengoptimalkan kinerja audit internal dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance,* maka penulisan tertarik untuk mengadakan penelitian judul **"**PERAN KOMITE AUDIT DALAM MENGOPTIMALKAN KINERJA AUDIT INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* Pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung".

1.2 Indenfikasi Masalah Dan Rumusan Penelitian

1.2.1 Idenfikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai peranan komite audit dan audit internal dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Pos Indonesia (persero), maka pembahasaan dan peneliti itu dapat mengindenfikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran komite sebagai saluran komunikasi antara komisaris dengan auditor internal yang menyebabkan keterlambatan dalam melakukan pertimbangan keputusan.
2. Semakin terpuruk dan tertinggalnya PT Pos Indonesia (Persero) dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis, disebabkan audit internal perusahaan perusahaan yang kurang baik.

3. Adanya perbedaan pendapatan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya ketua komite audit dimana komisarais menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan berdampak pada kurang optimalnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Pos Indonesia (Persero).

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran komite audit di PT Pos Indonesia.
2. Bagaimana kinerja audit internal di PT Pos Indonesia
3. Bagaimana *Good Corporate Governance* di PT Pos Indonesia.
4. Seberapa besar peran komite audit dalam mengoptimalkan kinerja audit internal terhadap pelaksanan *good corporate governance* di PT Pos Indonesia.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian dalam melakukan penetilitan ini adalah untuk mengetahui peran komite audit dalam mengoptimalkan kinerja audit internal terhadap peningkataan pelaksanaan *good corporate governance* di PT Pos Indonesia(persero) bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran komite audit di PT Pos Indonesia.
2. Untuk mengetahui kinerja audit internel di PT Pos Indonesia.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan *good corporate governance* di PT Pos Indonesia.
4. Untuk mengetahui Seberapa besar peran komite audit dalam mengoptimalkan kinerja audit internal terhadap pelaksaan good corporate governance di PT Pos Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan Memberikan informasi tentang pemahaman peran komite audit dan kinerja audit internal terhadap peningkataan pelaksanaan *good corporate governance* sehingga dalam perkembangan praktek berikutnya akan semakin lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

   Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai peran komite audit , kinerja audit ineternal, dan *good corporate governance*.

2. Bagi peneliti lain

   Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan bisa menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

1.5 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pos Bandung, Jl. Asia Afrika No. 49 Bandung 40111. Dalam penelitian ini saya melakukan survei terhadap PT. Pos Indonesia (Persero). Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2011 sampai dengan Juli 2011. Adapun waktu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Pelaksanaan Penelitian

No	Schedule	Bulan																							
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																								
	a. Penyusunan UP	■	■	■																					
	b. Bimbingan				■	■	■	■	■																
	c. Pendaftaran Seminar UP							■	■																
	d. Seminar UP								■	■	■	■	■												
	e. Perbaikan								■	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Pengolahan Data													■	■	■									
4	Penyusunan Laporan dan Bimbingan													■	■	■	■								
5	Pendaftaran Ujian Sidang Akhir																■	■	■	■	■	■			
6	Ujian Sidang Akhir																						■	■	■